LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

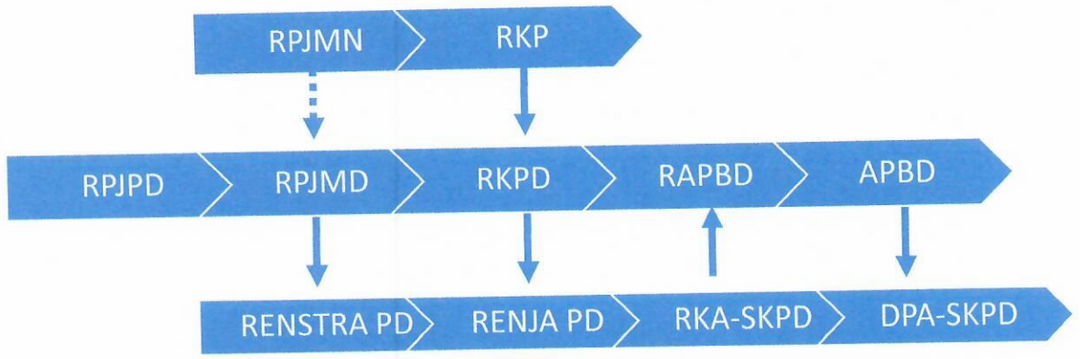
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan

Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:
- diperhatikan
- dipedomani dan/atau diacu
- dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluarahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2045;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
36. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
37. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
38. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
39. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
40. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian;

41. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah:

a. Merumuskan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
b. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, pagu indikatif, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2026;
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2026; dan
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD;
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.4. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah;
2.5. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
2.6. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati Nganjuk serta Program Nasional/Internasional yang Mencakup Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)
2.7. Isu-isu Penting dan Strategis untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan;
2.8. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
2.9. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2026 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2025, serta pencapaian RPJPD Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026-2029 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun2025

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (TW I 2025)	Tingkat capaian realisasi (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
					Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 %	70,20	80,50	75,65	93,98%	76%	0	0%
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	14 dokumen	4 laporan	14 laporan	14 laporan	100%	14 dokumen	4 dokumen	28,57%
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	4 laporan	7 laporan	7 laporan	100%	20 laporan	1 laporan	5%
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkatdaerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	-	-	-	-	6 laporan	3 laporan	50%
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	38 dokumen	20 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	100%	48 dokumen	1 dokumen	2,083%
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	13 orang/bulan	18 orang/bulan	14 orang/bulan	100%	168 orang	42 orang	25%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (TW I 2025)	Tingkat capaian realisasi (%)
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 laporan	-	20 laporan	1 laporan	5%	4 laporan	1 laporan	25%
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Ke pegawaian Perangkat Daerah yang disusun	18 paket	-	1 dokumen	0	0%	-	-	-
2	07	01	2.05	0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	18 paket	-	-	-	-	-	-	-
2	07	01	2.05	0021	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	7 paket	-	-	-	-	-	-	-
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Bagian Umum yang Dilaksanakan	1 paket	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	1 dokumen	14,29%
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 dokumen	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 laporan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	12 dokumen	3 dokumen	25%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (TW I 2025)	Tingkat capaian realisasi (%)
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	4 laporan	1 laporan	25%
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 dokumen	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	12 laporan	3 laporan	25%
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	192 unit	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 laporan	100%
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah SKPD yang diadakan	-	-	97 unit	97 unit	100%	74 unit	0 unit	0%
2	07	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	07	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	150 unit	-	-	-	-	-	-	-
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 unit	-	150 unit	150 unit	100%	36 unit	0 unit	0%
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	-	35 unit	35 unit	100%	28 unit	0 unit	0%
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	12 unit	12 unit	100%	98 unit	0 unit	0%
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	1 dokumen	6 laporan	14 laporan	14 laporan	100%	14 laporan	3 laporan	21,43%
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	12 laporan	3 laporan	25%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (TW I 2025)	Tingkat capaian realisasi (%)
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	12 laporan	3 laporan	25%
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	3 laporan	25%
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara.	1 unit	9 unit	28 unit	28 unit	100%	24 unit	0 unit	0%
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	0 unit	0%
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	1 unit	10 unit	10 unit	100%	5 unit	0 unit	0%
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	-	-	-	-	20 unit	0 unit	0%
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	21 unit	5 unit	5 unit	100%	17 unit	0 unit	0%
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	-	5 unit	5 unit	100%	3 unit	0 unit	0%
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12 unit	5 unit	5 unit	100%	17 unit	0 unit	0%
2	*07*				Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		60%							

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (TW I 2025)	Tingkat capaian realisasi (%)
2	07	02			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Prosentase akurasi, proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	4%	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Kerja (RTK)	Persentase perusahaan yang menyusun RTK	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (RTK) yang disusun	100%	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
2	07	03			Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster	60%	100%	100%	100%	100%	100%	28,57%	28,57%
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi	180 orang	66,04%	71%	60,20%	84,79%	72%	0,7%	0,010%
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	40 Lembaga	1.964 orang	180 orang	490 orang	272%	140 orang	40 orang	28,57%
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas intruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktifitas	80%	-	-	-	-	-	-	-
2	07	03	2.01	0003	Pengadaan sarana pelatihan sarana pelatihan kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	30 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK swasta yang dibina	5%	-	80%	50%	62,50%	82%	44,56%	54,34%
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	10 perusahaan	-	35 lembaga	50 lembaga	142,86%	45 lembaga	45 lembaga	100%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (TW I 2025)	Tingkat capaian realisasi (%)
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsultansi peningkatan produktivitas	100%	-	7%	30%	482,57%	11%	0%	0%
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultansi peningkatan produktivitas	3 perizinan	-	15 perusahaan	50 perusahaan	333%	45 lembaga	0 lembahga	0%
2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang memiliki perizinan	1%	-	-	-	-	-	-	-
2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumberdaya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara terintegrasi	Jumlah sumberdaya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintergrasi	25 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja tingkat daerah	72%	-	2%	0%	0%	-	-	-
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	85%	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	1500 orang	-	83%	73,21%	88,20%	84%	57,28%	71,60%
2	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan fasilitasi pelayanan antar kerja	400 orang	-	86%	57,79%	67,20%	87%	0%	0%
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatiahan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	150 Orang	-	500 orang	60 orang	12%	50 orang	0 orang	0%
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layan AKAD dan AKL	20 orang	-	-	-	-	60 orang	0 orang	0%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (TW I 2025)	Tingkat capaian realisasi (%)
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaptkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	500 orang	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	5%	-	20 orang	50 orang	250%	40 orang	0 orang	0%
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	15 Lembaga	-	800 orang	401 orang	50,21%	-	-	-
2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LPTKS yang memiliki perizinan	15 Lembaga	-	6%	0%	0%	-	-	-
2	07	04	2.02	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang terintergrasi	70%	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendaliansesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK) online	1.000 orang	-	80%	58,60%	73,25%	85%	0%	0%
2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	1.250 orang	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencaridan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui jumlah sistem online (karir hub)	70%	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	50 0rang	-	2.700 orang	2.432 orang	90,07%	250 orang	0 orang	0%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (TW I 2025)	Tingkat capaian realisasi (%)
2	07	04	2.04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penemp atan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI (pra dan purna penempatan) yang terfasilitasi	20 orang	-	75%	0%	0%	85%	0%	0%
2	07	04	2.04	0001	PeningkatanPerlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI /PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	40 orang	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.04	0002	Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	80%	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purnayang diberdayakan	15%	-	-	-	-	20 orang	0 orang	0%
2	07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	35 perusahaan	-	90%	100%	111,11%	90%	100%	111,11%
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%	35 perusahaan	-	100 perusahaan	177 perusahaan	177%	100 perusahaan	23 perusahaan	23%
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan HI dan terdaftar di WLKP online	30 laporan	-	-	-	-	-	-	-
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (TW I 2025)	Tingkat capaian realisasi (%)
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjaserta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (Pendataan sarana HI)	4%	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (Pembinaan Kepesertaan BPJS)	50 perkara	-	-	-	-	-	-	-
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Angka Sengketa per Tahun	20 perkara	-	0,45%	0,45%	22,5%	2%	0,45%	22,5%
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	40 asosiasi dan SP	-	2 perkara	1 Perkara	50%	5 perkara	1 perkara	20%
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, MogokKerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara perselisihan yang terselesaikan (Penyelesaian Perselisihan HI)	30 lembaga	-	-	-	-	4 perkara	1 perkara	0,25%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (TW I 2025)	Tingkat capaian realisasi (%)
2	*07*	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan RekapitulasiK eanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serika tBuruhserta non afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi (Pembinaan Hi dan Norma Kerja)	80 orang	-	-	-	-	-	-	-
2	*07*	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina		-	30 lembaga	1 Lembaga	3,33%	1 lembaga	1 lembaga	100%
2	*07*	05	2.02	0005	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Jumlah program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja		-	800 orang	15.568 orang	194,6%	23.231 orang	3.950 orang	17%
3					Urusan Pemerintahan Pilihan		30%							
3	32				Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi		30%							
3	32	03			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan	3 laporan	-	40%	6,67%	16,68%	50%	0%	0%
3	32	03	03		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	10 KK	-	40%	6,67%	16,68%	50%	0%	0%
3	32	03	03	0001	Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan Transmigrasi yang berasaldari 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	50 orang	-	-	-	-	-	-	0%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (TW I 2025)	Tingkat capaian realisasi (%)
3	32	03	03	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasaldari 1 (satu) daerahKabupaten / Kota	Jumlah Transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	4 KK	-	3 KK	1 KK	33,33%	2 KK	0 KK	0%
3	32	03	03	0005	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah calon Transmigran yang mendapatkan penyuluhan	4 lokasi	-	-	-	-	-	-	0%
3	32	03	2.01	0007	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan diri di satuan pemukiman transmigrasi	10 KK	-	-	-	-	-	-	0%
3	32	03	2.01	0009	Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang dilaksanakan Penjajakan	10 KK	-	4 lokasi	1 lokasi	25%	1 lokasi	0 lokasi	0%
3	32	03	2.01	0012	Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran	Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan pelatihan	10 paket	-	-	-	-	-	-	0%
3	32	03	2.01	0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten/kota sampai ke lokasi	3 lokasi	-	10 KK	1 KK	10%	-	-	0%
3	32	03	2.01	0019	Bantuan permodalan (dalam bentuk uang saku)	Jumlah bantuan permodalan yang diberikan kepada transmigran		-	-	-	-	2 paket	-	0%
3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi		-	4 lokasi	1 lokasi	25%	1 lokasi	0 lokasi	0%

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.1.1
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian RPJPD Perangkat Daerah s/d triwulan I Tahun 2025 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJPD Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.2
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0%	Sangat rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Belum ada faktor penyebab terhambatnya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Capaian masih 0% hal ini dikarenakan dengan indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target nilai masih tribulan III tahun 2025	Sudah berupaya maksimal memenuhi permintaan data yang dibutuhkan SAKIP

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	28,57%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Saat ini belum ada hambatan untuk capaian kinerja indikator ini	Pelatihan masih dalam proses pelaksanaan dan masih cukup banyak masyarakat yang belum membuka usaha mandiri	Melakukan pendampingan dengan mengelompokkan peserta berdasarkan usaha yang ditekuni untuk memudahkan monitoring dan pengembangan embrio usaha dan juga memberikan bantuan sarana usaha
Program Penempatan Tenaga Kerja	57,28%	Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Saat ini belum ada hambatan untuk capaian kinerja indikator ini	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 57,28% yang diperoleh dari jumlah pencari kerja yang terdaftar sejumlah 1.421 pencari kerja dan 814 diantaranya berhasil difasilitasi penempatannya pada perusahaan.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk terkait dengan kebutuhan karyawan pada Perusahaan sebagaimana rekomendasi Kepala Dinas.

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Hubungan Industrial	100%	Sangat tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Perlu pemahaman antara Perusahaan dan Pekerja/Buruh terkait Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Target yang ditentukan dalam Renstra sebesar 90% dan telah terealisasi sebesar 100%. Hal ini berarti telah mencapai target karena kasus perselisihan hubungan industrial yang tercatat sebanyak 1 perkara dan dapat diselesaikan diluar pengadilan.	Untuk tahun yang akan datang supaya menambah target capaian
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	0%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Belum ada kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada triwulan I karena belum adanya kuota pemberangkatan calon transmigrant dari Kementerian	Belum ada realisasi atau pelaksanaan pemberangkatan calon transmigrasi karena belum ada jadwal dan kuota pemberangkatan dari Kementerian	Segera melakukan koordinasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan kuota calon transmigran

Sumber: Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk sampai dengan tahun 2025 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Urusan Tenaga Kerja							
1.	Tujuan : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,50%	68%	68,50%	69,79%	-	-	Renstra tahun 2024-2026
2.	Sasaran 1 : Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	83%	84%	85%	73,21%	-	-	Renstra tahun 2024-2026
3.	Sasaran 2 : Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluarpengadilan	90%	90%	90%	100%	-	-	Renstra tahun 2024-2026

Tabel 2.2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Urusan Tenaga Kerja							
1.	Pencari kerja yang ditempatkan	2.600 orang	2.650 orang	2.700 orang	4.749 orang	-	-	Renstra tahun 2024-2026
2.	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan perjanjian bersama	3 perkara	4 perkara	5 perkara	0 perkara	-	-	Renstra tahun 2024-2026
3.	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	1 KK	1 KK	1 KK	1 KK	-	-	Renstra tahun 2024-2026

Dari hasil survey angkatan kerja nasional (SAKERNAS) yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Nganjuk data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat disajikan tabel seperti berikut ini:

Tabel 1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2022–Agustus 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Ags 2022–Ags 2023		Perubahan Ags 2023–Ags 2024	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	847,60	891,13	898,95	43,53	5,14	7,82	0,88
Angkatan Kerja	566,10	596,11	627,40	30,01	5,30	31,29	5,25
- Bekerja	539,24	568,20	603,10	28,96	5,37	34,90	6,14
- Pengangguran	26,85	27,91	24,30	1,06	3,95	-3,61	-12,93
Bukan Angkatan Kerja	281,51	295,01	271,55	13,50	4,80	-23,46	-7,95
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,74	4,68	3,87	-0,06		-0,81	
- Laki-laki	4,02	4,59	3,80	0,57		-0,79	
- Perempuan	5,92	4,84	3,97	-1,08		-0,87	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,79	66,89	69,79	0,10		2,90	
- Laki-laki	83,64	84,91	84,35	1,27		-0,56	
- Perempuan	50,31	48,86	55,22	-1,45		6,36	

Pada tahun 2024, indikator kinerja Tujuan yaitu Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di angka 69,79% dari target yang ditentukan sebesar 67,50% dengan capaian kinerja sebesar 103,39%. Hal ini diperoleh dari jumlah angkatan kerja sebesar 627.400 orang dibagi jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sebesar 898.950 orang. Capaian kinerja TPAK mengalami kenaikan karena sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Nganjuk.

Pada Triwulan I tahun 2025 untuk pencapaian dengan indikator Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih menggunakan data capaian tahun 2024. Hal ini dikarenakan BPS Kabupaten Nganjuk belum merilis untuk hasil tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Tenaga Kerja telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan TPAK seperti program pelatihan kerja, peningkatan akses ke pendidikan, dan pengembangan infrastruktur. Upaya-upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan angkatan kerja, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam perekonomian. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk

meningkatkan TPAK, seperti pengangguran, ketidakcocokan antara keterampilan angkatan kerja dengan kebutuhan industri, dan akses terbatas ke pendidikan dan pelatihan. Dalam rangka meningkatkan TPAK, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih efektif dan efisien, seperti pengembangan program pelatihan kerja yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan akses ke pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan infrastruktur yang lebih baik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan di sektor ketenagakerjaan meliputi penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor ketenagakerjaan, menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Permasalahan yang kerap dihadapi pada Dinas Tenaga Kerja adalah:

1. Belum sesuainya kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
2. Masih tingginya tingkat turn over di perusahaan karena rendahnya etos kerja
3. Masih adanya perusahaan yang belum menerapkan norma dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor tenaga kerja, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dapat merumuskan isu strategis dari permasalahan tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi pencari kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja
2. Peningkatan etos kerja melalui pembentukan karakter tenaga kerja yang produktif
3. Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di Perusahaan

2.4. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2025 dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, sehingga pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sebesar **86%** dengan mutu pelayanan **Baik**, juga menggunakan indikator penilaian kepuasan masyarakat yang mendasarkan 9 unsur yang diwajibkan dalam peraturan tersebut yang meliputi:

1. Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruhproses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara. Segala jenis pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk tidak dipungut biaya atau GRATIS.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam

mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun di Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2

Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1.	Persyaratan	100%
2.	Prosedur	100%
3.	Waktu Pelayanan	100%
4.	Biaya/Tarif	100%
5.	Produk Spesifikasi Jenis	100%
6.	Layanan	100%
7.	Kompetensi Pelaksana	100%
8.	Sarana Prasarana	100%
9.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	100%

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

2.5. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, terdapat beberapa faktor pendorong maupun faktor penghambat dalam hal peningkatan pelayanan baik dari kondisi internal dan eksternal, antara lain:

Kondisi Internal

a. Faktor Pendorong

1) Kabupaten Nganjuk memiliki potensi sebagai daerah kawasan industri alternatif di Jawa Timur, karena masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan serta angkatan kerja yang cukup banyak;

2) Kondisi hubungan industrial yang relatif kondusif;

b. Faktor Penghambat

1) Belum diterapkannya penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) dengan tegas dan jelas sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

2) Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi

3) Belum optimalnya personil dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya

4) Belum optimalnya penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi

Kondisi Eksternal

a. Faktor Pendorong

1) Jumlah Infrastruktur perhubungan yang memadai khususnya dampak pembangunan jalan tol trans jawa.

2) Investor luar daerah mulai mengalihkan investasinya terutama industri padat karya ke daerah yang relatif kondusif hubungan industrialnya, pun juga Upah Minimum Kabupaten Nganjuk dipandang masih rasional

3) Tingginya minat masyarakat dalam mengikuti fasilitasi maupun pelatihan

4) Teknologi informasi yang semakin maju

b. Faktor Penghambat

1) Masih tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran

2) Persaingan produk sejenis dari luar daerah

3) Kurangnya sinergisitas kebijakan/regulasi dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

4) Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja

5) Banyak tenaga kerja belum bersertifikasi kompetensi (belum lulus uji kompetensi)

6) Rendahnya motivasi untuk bersaing di pasar kerja lokal, nasional maupun global

7) Masih rendahnya kesejahteraan pekerja

8) Minat masyarakat yang terbatas pada jenis jenis pekerjaan tertentu

2.6 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati Nganjuk serta Program Nasional/Internasional Yang Mencakup Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

A. Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Telah ditetapkan Visi dan Misi Bupati terpilih Kabupaten Nganjuk periode 2025-2029 yaitu, **"Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat"** dengan 7 misi yaitu:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan MYE, serta dapat memelihara kerukunan, ketenterama, dan ketertiban.
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
3. Mewujidkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
5. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal.
6. Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna.
7. Meningkatkan kebanggan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal.

Adapun misi yang diamantkan pencapaiannya pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk yaitu Misi ke-5 **"Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal."**

Program Nganjuk "Melesat" yaitu :

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran
2. Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
3. **Pengentasan kemiskinan dan pengangguran**
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren
6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga kelurahan
7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata
8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional
9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan
10. Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup
12. Revitalisasi bidang peternakan dan pertanian serta subsidi pupuk
13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif, UMKM
14. Pengembangan jejaring antar daerah kabupaten, kota, provinsi dan pusat serta warga Nganjuk di perantauan
15. Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM dan kader)

Adapun Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk telah dirumuskan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Visi : Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat			
Misi 5: Meningkatkan keberpihakan Pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya produksi sektor	Menarik investor dengan insentif pajak dan	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

Visi : Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat			
Misi 5: Meningkatkan keberpihakan Pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
daerah yang inklusif	strategis dan investasi daerah yang diiringi dengan penurunan pengangguran	kemudahan perizinan untuk membangun industri yang dapat menyerap banyak tenaga kerja	Meningkatkan pembinaan terhadap kualitas Lembaga Pelatihan Kerja
			Meningkatkan penempatan angkatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
			Mengoptimalkan penempatan calon transmigran
			Optimalisasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial
			Pembinaan norma dan syarat kerja secara berkelanjutan
			Optimalisasi tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan ketentuan hukum peraturan ketenagakerjaan
			Memberdayakan lembaga kerjasama Bipartit di tiap-tiap perusahaan sebagai salah satu sarana hubungan industrial dalam rangka menjalin komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan pekerja

B. Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.

15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi *(means of implementation)* dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi (Perangkat Daerah) memberikan kontibusi terhadap **Tujuan ke 8 yaitu *Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang*** dengan sasaran menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Kabupaten Nganjuk

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2023)	Target Pencapaian			Perangkat Daerah Pelaksana
					2024	2025	2026	
Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan								
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3.1.[b]	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Naker	persen	73,21	83	85	87	DISNAKER
Tujuan 8 :Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi								
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.								
Proxy	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Naker	persen	66,89	67,50	68	68,50	DISNAKER
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.								
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin							
Proxy	Persentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi kluster	Naker	persen	100	100	100	100	DISNAKER
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Bappeda, Naker	persen	4,68				
Proxy	Tingkat Pengangguran Terbuka	Naker	persen	4,68				
8.5.2.[a]	Persentase setengah pengangguran.	Naker						

Proxy	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Naker	persen	82,04	83	84	85	DISNAKER
Target 8.8 Melindungi hakhak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.								
8.8.1.(a)	Jumlah klaim manfaat jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan	Naker						Untuk JKK itu merupakan ranah Pengawas Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan
Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan								
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.								
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Naker	persen	73,21	83	85	87	DISNAKER
Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, terma-suk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.								
10.7.2.(c)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Naker	orang	657	350	400	400	DISNAKER
Proxy	Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan	Naker	persen	9,09	40	50	60	DISNAKER

2.7 Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindak lanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan di sektor ketenagakerjaan meliputi penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor ketenagakerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu- isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan

terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Permasalahan yang kerap dihadapi pada Dinas Tenaga Kerja adalah:

1. Belum sesuainya kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja;
2. Masih tingginya tingkat turn over di perusahaan karena rendahnya etos kerja;
3. Masih adanya perusahaan yang belum menerapkan norma dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor tenaga kerja, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dapat merumuskan isu strategis, yakni sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi pencari kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja;
2. Peningkatan etos kerja melalui pembentukan karakter tenaga kerja yang produktif;
3. Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di Perusahaan.

2.8 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah **"Peningkatan Daya Saing Daerah dan Transformasi Pelayanan Publik"**

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2026 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2026 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.8

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disnaker	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**81,50**	**6.394.307.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Disnaker	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**76,50 nilai**	**5.327.104.978**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**26 dokumen**	**23.188.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Disnaker	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Ditetapkan**	**26 dokumen**	**49.900.000**	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	15.680.000	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	32.400.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	7.508.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	17.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disnaker	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**32 dokumen**	**3.651.461.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Disnaker	**Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun**	**4 laporan**	**3.431.389.000**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang/bulan	3.647.333.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	3.427.249.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	4.128.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4.140.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disnaker	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 dokumen**	**60.800.000**						
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	70.000.000						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disnaker	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**32 dokumen**	**429.531.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Disnaker	**Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran yang Disediakan Daerah**	**1 paket**	**412.955.500**	
							Disnaker	**Jumlah Laporan Penatausahaan Perkantoran yang Disusun**	**4 laporan**		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disnaker	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	27.500.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disnaker	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	752.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	65.600.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	80.575.350	
	Penyediaan Barang Cetakan	Disnaker	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 paket	25.306.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disnaker	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	11.628.400	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Penggandaan		Penggandaan yang Disediakan								
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disnaker	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disnaker	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	3.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disnaker	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	20.125.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disnaker	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	7.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	155.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	295.283.000	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Disnaker	Jumlah dokumen penataan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	30.000.000	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Disnaker	Jumlah dokumen penataan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	4.100.000	
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Disnaker	**Jumlah barang milik daerah yang disediakan**	**32 unit**	**181.000.000**	**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	Disnaker	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan**	**93 unit**	**413.715.228**	
	Pengadaan mebel	Disnaker	Jumlah paket mebel yang disediakan	20 unit	40.000.000	Pengadaan mebel	Disnaker	Jumlah paket mebel yang disediakan	20 unit	38.039.500	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Disnaker	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	96.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Disnaker	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	368.086.328	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Disnaker	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	45.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Disnaker	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	7.589.400	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**28 laporan**	**642.780.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Disnaker	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran yang Disusun**	**4 laporan**	**593.577.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	3.825.000	
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	98.000.000	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	534.780.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	559.752.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disnaker	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**28 unit**	**1.587.067.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Disnaker	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik**	**28 unit**	**375.567.250**	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	76.000.000	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	48.637.250	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	226.067.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	101.100.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dinas Operasional atau Lapangan										
	Pemeliharaan mebel	Disnaker	Jumlah mebel yang dipelihara	3 unit	25.000.000	Pemeliharaan mebel	Disnaker	Jumlah mebel yang dipelihara	6 unit	3.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	80.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	10.350.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disnaker	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	55.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disnaker	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	206.180.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disnaker	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	1.125.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disnaker	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	6.300.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					
	Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker	**Prosentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster**	**100%**	**1.820.000.000**	**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Disnaker	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	**52,82%**	**555,469,000**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Disnaker	**Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi**	**73%**	**1.650.000.000**	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	Disnaker	**Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan**	**16%**	**517.469.000**	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Disnaker	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	300 orang	1.500.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Disnaker	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	105 orang	505.469.000	
	Pengadaan sarana pelatihan sarana pelatihan kerja Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	1 paket	150.000.000	Proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi	Disnaker	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	25 orang	12.000.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnaker	**Persentase LPK swasta yang dibina**	**83%**	**95.000.000**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Disnaker	**Jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi**	**3 lembaga**	**15.000.000**	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnaker	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	50 lembaga	95.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnaker	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	45 lembaga	15.000.000	
	Konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil	Disnaker	**Persentase perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktifitas**	**15%**	**29.947.000**	**Konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil**	Disnaker	**Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsultansi peningkatan produktivitas**	**15%**	**24.717.000**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil	Disnaker	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktifitas	30 perusahaan	75.000.000	Pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil	Disnaker	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktifitas	15 perusahaan	24.717.000	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Disnaker	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**	**85%**	**1.105.000.000**	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	Disnaker	**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten**	**77%**	**933.887.750**	
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	**Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan fasilitasi pelayanan antar kerja**	**88%**	**755.000.000**	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	**Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mendapatkan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja**	**10%**	**640.803.400**	
	Penyediaan sumberdaya pelayanan antar kerja	Disnaker	Jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dll untuk meningkatkan kompetensi	500 orang	105.000.000	Penyediaan sumberdaya pelayanan antar kerja	Disnaker	Jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dll untuk meningkatkan kompetensi	50 orang	80.900.000	
	Pelayanan Antar Kerja	Disnaker	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	60 orang	500.000.000	Pelayanan Antar Kerja	Disnaker	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	120 orang	500.401.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelayanan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Disnaker	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	40 orang	150.000.000	Pelayanan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Disnaker	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	20 orang	59.502.400	
	Pengelolaan informasi pasar kerja	Disnaker	**Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK online)**	**90%**	**250.000.000**	**Pengelolaan informasi pasar kerja**	Disnaker	**Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair**	**60%**	**181.680.000**	
	Jobfair/bursa kerja	Disnaker	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui jobfair/bursa kerja	1.500 orang	250.000.000	Jobfair/bursa kerja	Disnaker	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui jobfair/bursa kerja	1.000 orang	181.680.000	
	Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	**Persentase PMI (pra dan purna penempatan) yang terfasilitasi**	**90%**	**100.000.000**	**Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	**Jumlah PMI (pra dan purna penempatan) yang difasilitasi**	**85%**	**111.404.350**	
	Pemberdayaan Pekerja migran indonesia purna penempatan	Disnaker	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	20 orang	100.000.000	Pemberdayaan Pekerja migran indonesia purna penempatan	Disnaker	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	40 orang	111.404.350	
	Program Hubungan Industrial	Disnaker	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang**	**90%**	**607.016.200**	**Program Hubungan Industrial**	Disnaker	**Persentase perselisihan hubungan industrial yang**	**90,15%**	**1.322.406.100**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			diselesaikan diluar Pengadilan					**selesai dengan perjanjian bersama (PB)**			
							Disnaker	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	**6,05%**		
							Disnaker	**Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**	**30,26%**		
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanajian Kerja Bersama untu yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Disnaker	**Jumlah perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%**	**102 perusahaan**	**28.606.200**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanajian Kerja Bersama untu yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	Disnaker	**Jumlah perusahaan yang memiliki LKS Bipartit aktif**	**30 perusahaan**	**20.292.000**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Jumlah Perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial (min. 3 sarana)	**13 perusahaan**		
		Disnaker	**Presentase Angka Sengketa per Tahun**	**2%**	**578.410.000**			**Persentase PP/PKB Perusahaan yang memuat syarat kerja**	**90,05%**		
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial teaga Kerja serta Pengupahan	Disnaker	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	1 laporan	28.606.200	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial teaga Kerja serta Pengupahan	Disnaker	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	1 laporan	20.292.000	
		Disnaker	Jumlah perselisihan yang dicegah	5 perkara	385.200.000						
		Disnaker	Jumlah Perkara perselisihan yang terselesaikan (Penyelesaian Perselisihan HI)	4 perkara	62.000.000						
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,	Disnaker				**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan**	Disnaker	**Presentase Angka Sengketa per Tahun**	**2,1%**	**1.302.114.100**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					**Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**					
						Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah perselisihan yang dicegah	5 perkara	403.187.000	
						Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, MogokKerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Perkara perselisihan yang terselesaikan (Penyelesaian Perselisihan HI)	4 perkara	30.202.000	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	80.210.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	79.300.000	
	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Disnaker	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	14.500 orang	51.000.000	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja		Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	16.200 orang	789.425.100	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan Pilihan					**Urusan Pemerintahan Pilihan**					
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi					**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**					
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Disnaker	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	**60%**	**195.000.000**	**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	Disnaker	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	**100%**	**32.000.000**	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	60%	**195.000.000**	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	**Jumlah transmigran yang diberangkatkan**	**2 KK**	**32.000.000**	
	Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan Transmigrasi yang berasaldari 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	Disnaker	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	2 laporan	45.000.000						
	Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	2 KK	50.000.000	Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	2 KK	28.000.000	
	Penjajagan ke calon lokasi penempatan calon transmigran	Disnaker	Jumlah calon lokasi penempatan transmigran yang dilaksanakan penjajagan	1 lokasi	60.000.000	Penjajagan ke calon lokasi penempatan calon transmigran	Disnaker	Jumlah calon lokasi penempatan transmigran yang dilaksanakan penjajagan	1 lokasi	2.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi	Disnaker	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	1 lokasi	40.000.000	Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi	Disnaker	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	1 lokasi	2.000.000	
TOTAL					**10.121.323.200**	**TOTAL**				**8.162.584.828**	

Sumber: Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

2.9 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk. Sesuai dengan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu menggunakan pendekatan atas-bawah (*top-down*) yaitu perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah (*top-down*) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Disinilah semua data dari para pemangku kepentingan berawal dan berakhir. Usulan dari semua pemangku kepentingan disusun sebagai bahan untuk didiskusikan, ditelaah secara kritis oleh semua pemangku kepentingan pengusul, dan konfirmasi kembali sebelum diproses menjadi Rencana Kerja (RENJA). Telaahan usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan selajutnya disajikan dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase bersertifikat kompetensi		
1.	Pelatihan dan Tambahan Modal ibu2 Pelaku UMKM			20 orang	
2.	Bantuan Pelatihan Kerja			20 orang	
3.	Pelatihan Bengkel motor untuk pemuda karangtaruna			20 orang	
4.	Pelatihan Membatik (ecoprint) untuk ibu - ibu PKK			20 orang	

Sumber : SIPD RI

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan nasional untuk tahun 2026 sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dan sejalan dengan RPJMN 2025–2029. Fokus tematik RKP 2026 Pemerintah menekankan tema **"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"**, sebagai dasar program tahun 2026. Sinergi RPJMN Tahun 2025-2029 menetapkan 8 prioritas nasional **"Asta Cita"**, yang menjadi kerangka utama pembangunan:

1. Ideologi Pancasila & hak asasi
2. Ketahanan nasional & kemandirian ekonomi (pangan, energi, blue/green economy, ekonomi syariah/digital)
3. Infrastruktur, industri kreatif & agromaritim
4. Sumber daya manusia & inklusi sosial
5. Hilirisasi industri berbasis SDA
6. Pembangunan dari desa & pengentasan kemiskinan
7. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
8. Keharmonisan lingkungan & sosial budaya

Dalam hal tersebut Dinas Tenaga Kerja mengampu prioritas nasional nomor 6 yaitu **"Pembangunan dari desa & pengentasan kemiskinan"**. Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2026 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

Dinas Tenaga Kerja dalam mendukung prioritas nasional tersebut berupaya menekan angka tingkat pengangguran terbuka dengan melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga Kerja antara lain kegiatan pelatihan menjahit, pelatihan servis motor dan pelatihan barista.
2. Program Penempatan Tenaga Kerja antara lain kegiatan pelayanan antar kerja berupa pelatihan di Perusahaan, pelatihan menjahit untuk disabilitas, pelatihan pembuatan aneka makanan dan

pelatihan menjahit untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna penempatan, kegiatan Job Fair.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah "*Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja*", adapun sasaran yang akan dicapai adalah "*Meningkatnya penyerapan tenaga kerja*" dan *"Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis"*, dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2026**
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	35,88 juta Rp/tenaga kerja
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2026**
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,95%
Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	90,15%

Sumber : Ranwal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3 Program dan Kegiatan

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2026. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam Bidang Tenaga Kerja.

Tabel 4.1

Program Prioritas Pembangunan Alokasi Anggaran Tahun 2026

kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	
			Target	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	54%	-
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	52,82%	555,469,000
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten	77%	933.887.750
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan perjanjian bersama (PB)	90,15%	1.322.406.100
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	6,05%	
		Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	30,26%	

Untuk menjalankan Strategi dan Arah Kebijakan guna mencapai Sasaran RPD, maka disusun Program Pembangunan Daerah. Program Pembangunan Daerah mencakup Program Unggulan berdasarkan prioritas dan identifikasi isu strategis daerah dan telah disepakati bersama dalam Forum Konsultansi Publik, serta merupakan Program Perangkat Daerah yang bersifat strategis yang outcome-nya mendukung langsung dengan Sasaran RPD maupun sesuai dengan visi misi RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005- 2025 selaras dengan arahan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMN 2020-2024 serta RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Dengan demikian, program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Adapun program prioritas Dibnas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk pada point 3 yaitu ***Peningkatan Kesempatan Kerja.*** Pada point ini dapat dijelaskan bahwa salah satu variabel yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat adalah pengurangan tingkat pengangguran. Pengurangan angka pengangguran menjadi prioritas pada rencana Pembangunan daerah tahun 2024-2026. Pengurangan pengangguran ini dapat ditunjang dari beberapa program yaitu:

1. Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
   Pada program ini didukung oleh beberapa kegiatan untuk mengurangi pengangguran yaitu:
   a) Melaksanakan kegiatan pelatihan menjahit, kegiatan pelatihan servis sepeda motor, dan kegiatan pelatihan barista
   b) Melaksanakan kegiatan proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi yaitu dengan tujuan menjaring pencari kerja yang baru lulus sekolah untuk mendapatkan wawasan dan lowongan kerja yang ada di kabupaten Nganjuk
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
   Pada program ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu:
   a) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan dengan pelatihan menjahit bagi penyandang disabilitas
   b) Melaksanakan kegiatan berbasis kompetensi di Perusahaan
   c) Melaksanakan kegiatan Job Fair/ Pameran Bursa Kerja
   d) Melaksanakan kegiatan pelatihan pembuatan aneka makanan dan pelatihan menjahit untuk PMI purna penempatan maupun keluarganya

3. Program Hubungan Industrial

Adapun tujuan program ini adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif antara pekerja/buruh dan pengusaha dalam suatu perusahaan atau organisasi. Berikut beberapa tujuan hubungan industrial:

a) Meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja
b) Meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan pengusaha
c) Mencegah perselisihan dan konflik di tempat kerja
d) Meningkatkan komunikasi dan kerja sama antara pekerja/buruh dan pengusaha
e) Meningkatkan kualitas kerja dan hasil produksi
f) Meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja
g) Meningkatkan kesempatan kerja dan pengembangan karir bagi pekerja/buruh

Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, hubungan industrial dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif, produktif, dan harmonis, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi secara keseluruhan. Adapun kegiatan tersebut antara lain:

a) Pendataan sarana hubungan industrial
b) Rapat kerja tentang pembahasan usulan Upah Minimum Kabupaten
c) Bimbingan teknis penyelesaian hubungan industrial
d) Rapat kerja anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit

4. Program Transmigrasi

Adapun tujuan program ini adalah

a) Meningkatkan Persebaran Penduduk dan Tenaga Kerja
b) Meningkatkan Kesejahteraan Hidup dan Ketahanan Pangan
c) Meningkatkan Persatuan dan Keamanan Penduduk
d) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi
e) Meningkatkan Integrasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi

Adapun kegiatan tersebut antara lain:

a) Pemindahan dan penempatan trasnmigran
b) Penjajagan ke calon lokasi penempatan calon transmigran
c) Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS TENAGA KERJA KAB. NGANJUK
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS TENAGA KERJA						**8.162.584.828,00**							**10.550.193.200,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.130.584.828,00**							**10.400.193.200,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**8.130.584.828,00**							**10.400.193.200,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.267.104.978,00**						-	**6.582.777.000,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Ditetapkan*	-			26 Dokumen	49.900.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai	-	23.188.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	32.400.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Pengingkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai		15.680.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	17.500.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Pengingkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai		7.508.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun*	-			4 Laporan	3.431.389.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga	-	3.651.461.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	3.427.249.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga		3.647.333.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4.140.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga		4.128.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Perkantoran yang Disusun* *Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran yang Disediakan*	-			4 Laporan 1 Paket	402.956.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga	-	329.531.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	752.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Pengingkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga		27.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	80.692.300,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Pengingkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga		65.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.628.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga		25.306.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga		6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	7.500.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga		20.125.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	295.283.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga		155.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4.100.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan*	-			93 Unit	413.715.228,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga	-	348.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	38.039.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	368.086.328,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga		263.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	7.589.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga		45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran yang Disusun*	-			4 Laporan	593.577.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga	-	642.780.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3.825.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga		98.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	569.752.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga		534.780.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik*	-			28 Unit	375.567.250,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga	-	1.587.067.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	48.637.250,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga		76.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	101.100.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga		226.067.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	3.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	10.350.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga		80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	206.180.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Pengingkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga		1.125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	6.300.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Pengingkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	seluruh pegawai Dinas Tenaga		55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**607.186.000,00**						-	**1.510.400.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan*	-			16 persen	567.469.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	pencari kerja, masyarakat penganggur dan masyarakat setengah penganggur	-	1.385.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				140 Orang	555.469.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	pencari kerja, masyarakat penganggur dan masyarakat setengah penganggur		1.372.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n				25 Orang	12.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	pencari kerja, masyarakat penganggur dan masyarakat setengah penganggur		13.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi*	-			3 Lembaga	15.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	Lembaga pelatihan kerja	-	95.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				45 Lembaga	15.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	Lembaga pelatihan kerja		95.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsultansi peningkatan produktivitas*	-			11 Persen	24.717.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	Perusahaan kecil	-	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				15 Perusahaan	24.717.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	Perusahaan kecil		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**933.887.750,00**						-	**800.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mendapatkan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja*	-			100 Orang	640.803.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	pencari kerja terdaftar	-	450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				50 Orang	80.900.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Pengingkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	pencari kerja terdaftar		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				120 Orang	500.401.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Pengingkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	pencari kerja terdaftar		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				20 Orang	59.502.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	pencari kerja terdaftar		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair*	-			60 persen	181.680.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	pencari kerja terdaftar, masyarakat penganggur dan setengah penganggur	-	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				1000 Orang	181.680.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	pencari kerja terdaftar, masyarakat penganggur dan setengah penganggur		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah PMI (pra dan purna penempatan) yang difasilitasi*	-			85 persen	111.404.350,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	Pekerja Migran Indonesia (PMI)	-	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				40 Orang	111.404.350,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	Pekerja Migran Indonesia (PMI)		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**1.322.406.100,00**						-	**1.507.016.200,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah perusahaan yang memiliki LKS Bipartit aktif* *Jumlah Perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial (min. 3 sarana)* *Jumlah PP/PKB Perusahaan yang memuat syarat kerja*	-			30 Perusahaan 13 Perusahaan 90,05 persen	20.292.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	perusahaan	-	28.606.200,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	20.292.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	perusahaan		28.606.200,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Angka Sengketa Perusahaan per Tahun*	-			2,1 persen	1.302.114.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	Perusahaan, Pekerja Sosial Keagamaan, Petani Tembakau	-	1.478.410.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				5 Perkara	403.187.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Pengingkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	Perusahaan, Pekerja Sosial Keagamaan, Petani Tembakau		385.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				4 Perkara	30.202.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Pengingkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	Perusahaan, Pekerja Sosial Keagamaan, Petani Tembakau		62.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	79.300.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	Perusahaan, Pekerja Sosial Keagamaan, Petani Tembakau		80.210.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				15900 Orang	789.425.100,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	Perusahaan, Pekerja Sosial Keagamaan, Petani Tembakau		951.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**32.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**32.000.000,00**							**150.000.000,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**32.000.000,00**						-	**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah transmigran yang diberangkatkan*	-			2 KK	32.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	calon transmigran	-	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				2 Kepala Keluarga	28.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	calon transmigran		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan				1 Lokasi	2.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	calon transmigran		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi														
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi				1 Lokasi	2.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan	calon transmigran		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	JUMLAH							**8.162.584.828,00**							**10.550.193.200,00**	

Tabel 4.2

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
2	07				**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**			
2	07	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**76,50 nilai**	**5.267.104.978**
2	07	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Ditetapkan**	**26 dokumen**	**49.900.000**
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	32.400.000
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	17.500.000
2	07	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun**	**4 laporan**	**3.431.389.000**
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang/bulan	3.427.249.000
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4.140.000

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
2	07	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran yang Disediakan Daerah**	**1 paket**	**402.955.500**
						Jumlah Laporan Penatausahaan Perkantoran yang Disusun	**4 laporan**	
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	752.800
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	80.692.300
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	11.628.400
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	3.000.000
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	7.500.000
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	295.283.000
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penataan arsip dinamis pada SKPD	4 dokumen	4.100.000
2	07	01	2.07		**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan**	**93 unit**	**413.715.228**
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	50 unit	38.039.500
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	30 unit	368.086.328

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
2	07	01	2.07	0010	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	7.589.400
2	07	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran yang Disusun**	**4 laporan**	**593.577.000**
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	3.825.000
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	30.000.000
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	559.752.000
2	07	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik**	**28 unit**	**375.567.250**
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	48.637.250
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	101.100.000
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 unit	3.000.000

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	10.350.000
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	206.180.000
2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	6.300.000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
2	07				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			
2	07	03			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	**52,82%**	**607.186.000**
2	07	03	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan**	**16%**	**567.469.000**
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	140 orang	555.469.000

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
					Proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	25 orang	12.000.000
2	07	03	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi**	**3 lembaga**	**15.000.000**
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	45 lembaga	15.000.000
2	07	03	2.04		**Konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil**	**Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsultansi peningkatan produktivitas**	**11%**	**24.717.000**
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktifitas	15 perusahaan	24.717.000
2	07	04			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten**	**77%**	**933.887.750**
2	07	04	2.01		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mendapatkan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja**	**100 orang**	**640.803.400**

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan sumberdaya pelayanan antar kerja	Jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dll untuk meningkatkan kompetensi	50 orang	80.900.000
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	120 orang	500.401.000
2	07	04	2.01	0004	Pelayanan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	20 orang	59.502.400
2	07	04	2.03		**Pengelolaan informasi pasar kerja**	**Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair**	**60%**	**181.680.000**
2	07	04	2.03	0003	Jobfair/bursa kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui jobfair/bursa kerja	1.000 orang	181.680.000
2	07	04	2.04		**Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah PMI (pra dan purna penempatan) yang difasilitasi**	**85%**	**111.404.350**
2	07	04	2.03	0003	Pemberdayaan Pekerja migran indonesia purna penempatan	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	40 orang	111.404.350
2	07	05			**Program Hubungan Industrial**	**Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan perjanjian bersama (PB)**	**90,15%**	**1.322.406.100**
						Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,	**6,05%**	

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
						LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		
						Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	**30,26%**	
2	07	05	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanajian Kerja Bersama untu yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	**Jumlah perusahaan yang memiliki LKS Bipartit aktif**	**30 perusahaan**	**20.292.000**
						Jumlah Perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial (min. 3 sarana)	**13 perusahaan**	
						Persentase PP/PKB Perusahaan yang memuat syarat kerja	**90,05%**	
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial teaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	1 laporan	20.292.000
2	07	05	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Angka Sengketa per Tahun**	**2,1%**	**1.302.114.100**

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	5 perkara	403.187.000
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, MogokKerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara perselisihan yang terselesaikan (Penyelesaian Perselisihan HI)	4 perkara	30.202.000
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	79.300.000
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	15.900 orang	789.425.100
					Urusan Pemerintahan Pilihan			
3	32				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**			
3	32	03			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	**100%**	**32.000.000**
3	32	03	2.01		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah transmigran yang diberangkatkan**	**2 KK**	**32.000.000**

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
3	32	03	2.01	0004	Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	2 KK	28.000.000
3	32	03	2.01	0009	Penjajagan ke calon lokasi penempatan calon transmigran	Jumlah calon lokasi penempatan transmigran yang dilaksanakan penjajagan	1 lokasi	2.000.000
3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	1 lokasi	2.000.000
JUMLAH TOTAL								**8.162.584.828**

Tabel 4.3

Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
			N I H I L			

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dimaksud dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja dengan rencana pembangunan tahunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi sasaran strategis Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Renstra Dinas Tenaga Kerja yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja; dan

c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2026; dan
3. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001